



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kepentingan Tiongkok dan Hubungannya dengan
Konflik Sudan – Sudan Selatan

Skripsi

Oleh

Sharon Patricia

2013330046

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kepentingan Tiongkok dan Hubungannya dengan
Konflik Sudan – Sudan Selatan

Skripsi

Oleh

Sharon Patricia

2013330046

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi



Nama : Sharon Patricia
Nomor Pokok : 2013330046
Judul : Kepentingan Tiongkok dan Hubungannya dengan Konflik
Sudan – Sudan Selatan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 22 Juni 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono., Drs., M.A.

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sharon Patricia
NPM : 2013330046
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kepentingan Tiongkok dan Hubungannya dengan
Konflik Sudan – Sudan Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Sharon Patricia

Abstrak

Nama : Sharon Patricia
NPM : 2013330046
Judul : Kepentingan Tiongkok dan Hubungannya dengan
Konflik Sudan – Sudan Selatan

Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian yang terus berkembang saat ini. Perkembangan ekonomi ini pun diikuti dengan meningkatnya hubungan kerjasama Tiongkok dengan negara-negara lain khususnya negara-negara di Benua Afrika, yaitu Sudan dan Sudan Selatan. Menjadi hal yang menarik dan penting untuk dibahas mengenai perkembangan Tiongkok dalam dunia internasional. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas pertanyaan riset sebagai berikut: *Bagaimana Tiongkok Menjaga Kepentingan/Kerjasama Ekonomi dengan Sudan dan Sudan Selatan terkait Konflik Sudan-Sudan Selatan (2005-2014)?*

Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan teori dan beberapa konsep. Pertama, teori Liberalisme menurut John Locke yang menyatakan bahwa perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan internasional dapat dicapai melalui kerjasama dan cara-cara diplomasi. Kedua konsep *civil war* yang akan menjelaskan mengenai latar belakang perang saudara antara Sudan dan Sudan Selatan. Ketiga konsep *foreign policy* yang digunakan untuk menjelaskan untuk melihat keputusan suatu negara yang dapat berimplikasi terhadap negara-negara lainnya. Keempat konsep pihak ketiga yang akan menjelaskan posisi Tiongkok sebagai penengah antara Sudan dan Sudan Selatan. Kelima konsep diplomasi yaitu bagaimana suatu negara menjalin hubungan kerjasama melalui cara-cara diplomasi. Keenam konsep *national interest* yang berarti bahwa dalam hubungan kerjasama, setiap negara pasti memiliki kepentingannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri.

Penelitian ini menemukan bahwa, pada awalnya hubungan Tiongkok dan Sudan berjalan baik hingga akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan dan membentuk negara baru. Hubungan Tiongkok dengan Sudan tidak terlalu menemukan kendala namun sejak saat itulah Tiongkok berusaha lebih keras untuk menjalin hubungan dengan Sudan Selatan dikarenakan adanya ketidakpercayaan warga Sudan Selatan yang menilai Tiongkok berpihak kepada Sudan. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sudan Selatan, Tiongkok melakukan berbagai cara diplomasi, salah satunya dengan membuka konsulat umum di Juba, ibu kota Sudan Selatan. Cara ini ditempuh Tiongkok guna menjaga kepentingan nasionalnya yaitu memperoleh minyak baik dari Sudan maupun Sudan Selatan.

Kata kunci: Tiongkok, Sudan, Sudan Selatan, dan Kepentingan Nasional.

Abstract

Name : Sharon Patricia
NPM : 2013330046
Title : The National Interest of China and the
Relationship with the Conflict between Sudan and
South Sudan

China is a country which the economy is getting higher nowadays. The development of the China's economy follows by the increasing of the cooperation between China and other countries especially many countries in Africa, which is Sudan and South Sudan. This is an interesting matter to be discussed especially about the development of China in the international world. Because of that, the research question is: How does China keep the national interest/economic cooperation with the conflict of Sudan and South Sudan (2005-2014)?

To answer that question, the writer used a theory and some concepts. The first, Liberalism, according to John Locke that peace, security, and international justice can be achieved through the cooperation and the ways of diplomacy. The second is the concept of civil war, which used to explain the background of the conflict between Sudan and South Sudan. The third is the concept of foreign policy, that explained about a decision that made by a state could impact to other countries. The fourth is the concept of the role of a third party that will explain the position of China as a mediator between Sudan and South Sudan. The fifth is the concept of diplomacy that is how a country makes a cooperation with other countries through the diplomacy's ways. The last concept is the national interest which means that in the cooperation, every country has the national interest to fulfill the needs of his country itself.

This riset found that at the beginning, the relationship between China and Sudan was good until South Sudan decided to separate with Sudan and stand as a new country. The relationship between China and Sudan was not really complicated but with South Sudan, China has to make more efforts to build a cooperation because the people in South Sudan mistrusted to China and judged that China only supported South Sudan. To gain trust from South Sudan again, China uses many ways of diplomacy, one of that is opened the general consulate in Juba, the capital city of South Sudan. China used this way to still be a big partner of Sudan and South Sudan and also to fulfill the national interest, which is oil.

Key words: China, Sudan, South Sudan, and National Interest.

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya naikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya memilih topik mengenai perdagangan minyak antara Tiongkok dengan Sudan maupun Sudan Selatan. Alasan saya memilih topik ini adalah karena saya memiliki ketertarikan dengan perekonomian Tiongkok yang saat ini terus meningkat dan memberikan pengaruh bagi banyak negara. Selain itu saya pun tertarik dengan cara Tiongkok dalam menjalin hubungan kerjasama dengan kedua negara yang bersengketa ini, mengenai bagaimana Tiongkok dapat tetap menjalin kerjasama untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Harapan saya adalah agar skripsi ini dapat berguna bagi para akademisi yang sedang mencari data mengenai hubungan Tiongkok dan Sudan maupun Sudan Selatan agar dapat dijadikan sumber informasi. Saya memohon maaf apabila skripsi ini masih terbatas dan masih ada beberapa kekurangan. Oleh karena itu besar harapan saya agar penelitian ini dapat tetap dilanjutkan untuk melihat lebih jauh bagaimana peran Tiongkok dalam perkembangan dunia internasional.

Saya pun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya yang senantiasa mendukung baik secara finansial maupun moral serta doa yang tidak pernah putus. Kemudian saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr.

A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. sebagai dosen yang membimbing saya ketika seminar dan Dr. Aknolt Kristian Pakpahan selaku dosen pembimbing saya yang memberikan banyak masukan dan saran yang bermanfaat bagi skripsi saya. Selain itu saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang senantiasa memberikan semangat bagi saya.

Daftar Isi

Pernyataan.....	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	viii

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.4.1 Kajian Literatur.....	11
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Metodologi dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.6 Sistematika Pembahasan.....	25

2. Konflik Sudan dengan Sudan Selatan

2.1 Profil Sudan dan Sudan Selatan.....	28
2.1.1 Profil Sudan.....	28
2.1.2 Profil Sudan Selatan.....	30
2.1.3 Persebaran Agama di Sudan dan Sudan Selatan.....	32
2.2 Kronologis Konflik Sudan dengan Sudan Selatan.....	34
2.3 Akar Permasalahan Terjadinya Konflik.....	38
2.4 Pembagian Wilayah Sudan dan Sudan Selatan Setelah Konflik.....	44

2.5	Implikasi dari Konflik Sudan dan Sudan Selatan.....	46
2.5.1	Implikasi Sosial.....	46
2.5.2	Implikasi Ekonomi.....	47
2.5.3	Implikasi terhadap Hubungan Regional dan Internasional.....	48
3.	Kerjasama Ekonomi Tiongkok dan Sudan serta Sudan Selatan	
3.1	Latar Belakang Kerjasama Tiongkok dengan Sudan.....	51
3.1.1	Kerjasama Ekonomi.....	53
3.1.2	Kerjasama Militer.....	57
3.1.3	Kerjasama Politik.....	59
3.2	Peran Tiongkok dalam Konflik Sudan-Sudan Selatan.....	62
4.	Upaya Tiongkok Menjaga Kepentingannya di Tengah Konflik Sudan dan Sudan Selatan	
4.1	Hubungan Kerjasama Tiongkok dengan Sudan sebelum Sudan Selatan Merdeka.....	68
4.2	Hubungan Kerjasama Tiongkok dengan Kedua Negara.....	72
4.2.1	Hubungan Kerjasama Tiongkok dengan Sudan setelah Berpisah dengan Sudan Selatan.....	75
4.2.2	Hubungan Kerjasama Tiongkok dengan Sudan Selatan sebagai Negara Baru.....	79
4.3	Upaya Tiongkok dalam Menjaga Kepentingan Nasional di Sudan dan Sudan Selatan.....	88
4.3.1	Kepentingan Nasional Tiongkok di Sudan.....	89
4.3.2	Kepentingan Nasional Tiongkok di Sudan Selatan.....	90
5.	Penutup	
5.1	Kesimpulan.....	94
5.2	Saran.....	95

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jumlah Ekspor Sudan ke Tiongkok (2004-2010)	70
Tabel 4.2 Jumlah Impor Sudan dari Tiongkok (2004-2010).....	71

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Sudan dengan Ibu Kota Khartoum	28
Gambar 2.2 Peta Sudan Selatan dengan Ibu Kota Juba	30
Gambar 2.3 Abyei, wilayah utama yang diperebutkan oleh Sudan dan Sudan Selatan.....	41
Gambar 2.4 Wilayah persengketaan Sudan dan Sudan Selatan.....	43
Gambar 2.5 Peta Sudan Selatan sebelum dan sesudah memisahkan diri.....	45
Gambar 3.1 Pipa pengaliran minyak yang dibuat Tiongkok dari Blok 1 ke Blok 2	56
Gambar 4.1 Total Impor Minyak Tiongkok pada tahun 2010	69
Gambar 4.2 Ladang minyak Sudan dan Sudan Selatan	74
Gambar 4.3 Produksi minyak Sudan dan Sudan Selatan (2005-2014)	80
Gambar 4.4 Ekspor minyak Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2013.....	82

BAB I

Pendahuluan

Dalam Bab I akan dibahas mengenai pendahuluan yang merupakan pengantar dalam membahas penelitian ini lebih lanjut. Bab I terdiri dari 1.1 Latar Belakang Masalah, 1.2 Identifikasi Masalah yang terbagi menjadi 1.2.1 Pembatasan Masalah dan 1.2.2 Perumusan Masalah, 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran yang terbagi menjadi 1.4.1 Kajian Literatur dan 1.4.2 Kerangka Pemikiran, 1.5 Metodologi dan Teknik Pengumpulan Data, dan yang terakhir adalah 1.6 Sistematika Pembahasan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerjasama merupakan hubungan antara dua aktor atau lebih yang bertujuan untuk mencapai sesuatu atau pun menyelesaikan suatu permasalahan hingga pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi setiap pihak. Bentuk kerjasama ini dapat berdasarkan pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan, dan sebagainya. Dalam dunia internasional saat ini, kerjasama antar negara menjadi pilihan negara-negara untuk meningkatkan perekonomiannya, mencapai kepentingan nasionalnya, memperluas dukungan, dan juga untuk menyelesaikan konflik.

Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu hubungan kerjasama yaitu apa kepentingan fundamental dan tujuan dari kerjasama yang ingin dijalin

agar hubungan ini membawa keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat. Selain itu, perlu dilihat juga bagaimana bentuk dari kerjasama yang dijalin ini. Dengan melihat dari kepentingan mendasar serta bentuk kerjasamanya, maka diharapkan hubungan antar dua negara atau lebih ini akan memberikan dampak yang baik dan sesuai dengan kepentingan negara masing-masing.

Dalam tulisan ini, penulis ingin melihat bagaimana peran Tiongkok dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan serta implikasi terhadap kerjasama antar negara ini. Konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan ini menjadi poin penting bagi Tiongkok karena negara ini secara langsung dan aktif terlibat dalam perdagangan minyak dengan kedua negara yang sedang berkonflik. Oleh karena itu perlu diketahui apa motif sebenarnya dan kebijakan luar negeri seperti apa yang dilakukan Tiongkok untuk tetap menjaga kerjasama perdagangan minyaknya.

Negara Tiongkok merupakan salah satu negara yang terus berusaha untuk menjalin kerjasama dengan negara mana pun tanpa melihat budaya dan ideologi negara tersebut. Hal ini terlihat dari kerjasama yang dijalin Tiongkok dengan beberapa negara Afrika seperti Nigeria, Gabon, Sudan, Angola, dan Guinea Ekuatorial dalam hal perdagangan, khususnya perdagangan minyak¹.

¹ Michael Backman, 2008, *Asia Future Shock: Business Crisis and Opportunity in the Coming Years*, *UfukPress*,
<https://books.google.co.id/books?id=nbrbaLO9cDMC&pg=PA178&lpg=PA178&dq=perdagangan+minyak+china+dan+sudan&source=bl&ots=dw7LwBsIe2&sig=fSj01Z1VMQdGWAVMc-kw5jakPk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi215TPtqfLAhUBWo4KHb9aA0EQ6AEIUDAH#v=onepage&q&f=false>, diakses pada 02 Maret 2016.

Tiongkok tidak mengharuskan persyaratan yang rumit ketika memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang ingin menjalin kerjasama dengannya. Seperti yang dikatakan dalam pidato Zhou Enlai di Accra, Ghana pada 15 Januari 1964. Bahwa Tiongkok memberikan pinjaman atau bantuannya didasarkan pada keuntungan bersama dan tidak merugikan pihak mana pun, tidak akan melanggar kedaulatan negara penerima dengan melakukan intervensi ke dalam pemerintahannya, serta memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah agar negara penerima tidak merasa dirugikan². Karakteristik seperti inilah yang membuat Tiongkok sangat diterima di negara-negara Afrika.

Kriteria bantuan dan pinjaman seperti ini membuat Sudan memutuskan untuk bekerjasama dengan Tiongkok dalam mengembangkan infrastruktur serta perdagangan minyaknya. Hubungan kerjasama perekonomian antara Tiongkok dengan Sudan sudah dimulai sejak tahun 1962. Dalam tahun tersebut, kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian *Economic and Technical Cooperation* (ETC). Kemudian pada tahun 1970, kedua negara kembali menandatangani perjanjian penting lainnya yaitu *Cultural, Scientific and Technical Protocol* (CSTP). Kedua perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Tiongkok dengan

² Deborah Bräutigam, "China, Africa, and International Aid Architecture", *AFDB.org*, <http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WORKING%20107%20%20PDF%20E33.pdf>, diakses pada 02 April 2016.

Sudan dalam bidang infrastruktur, pembangunan masyarakat serta pertukaran para ahli untuk meningkatkan kerjasama kedua belah pihak³.

Perjanjian yang telah disepakati ini mulai terealisasi antara tahun 1970 hingga 1990 di mana Sudan menerima bantuan dana dan pinjaman dari Tiongkok untuk membangun jalan, jembatan, serta pengembangan sektor agrikultur terutama untuk memproduksi beras⁴.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kerjasama yang awalnya berfokus pada infrastruktur kemudian beralih kepada investasi terhadap sektor minyak yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar setiap harinya. Peralihan fokus Tiongkok ini pun memang merupakan strategi yang telah direncanakan untuk memproduksi dan mengolah minyak mentah yang terdapat di wilayah Sudan. Oleh karena itu sejak tahun 1999, *China National Petroleum Company* (CNPC) telah berinvestasi lebih dari 15 miliar USD di Sudan. Investasi ini dilakukan untuk membangun pipa saluran minyak di tiga blok yang berlokasi di Sudan Selatan⁵.

Hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan Sudan bertujuan untuk mencapai kepentingan negara masing-masing di mana Tiongkok membutuhkan minyak dan Sudan membutuhkan uang untuk pembangunan infrastruktur serta persenjataan karena saat itu masyarakat Sudan masih

³ Philip Manyok, "Oil and Darfur's Blood: China's Thirst for Sudan's Oil", *Journal of Political Sciences and Public Affairs*, <http://www.esciencecentral.org/journals/oil-and-darfurs-blood-chinas-thirst-for-sudans-oil-2332-0761-1000189.php?aid=69390>, diakses pada 01 April 2016.

⁴ *ibid.*

⁵ Zhou Hang, "China and South Sudan: economic engagement continues amid conflict" *AfricanArguments.org*, <http://africanarguments.org/2014/09/12/china-and-south-sudan-economic-engagement-continues-amid-conflict-by-zhou-hang/>, diakses pada 01 April 2016.

sering melakukan perang. Kedua negara ini pun saling bekerjasama yaitu Sudan menjual minyaknya kepada Tiongkok dan kemudian Tiongkok membayarnya dengan uang maupun persenjataan⁶.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa pisahnya Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2011 telah memberikan dampak bagi Sudan itu sendiri serta bagi kerjasama yang dijalin dengan Tiongkok⁷. Pisahnya Sudan Selatan ini membuat adanya kebijakan baru dalam perdagangan minyak dengan Tiongkok yang juga membuat penurunan jumlah ekspor minyak mentah kepada Tiongkok.

Oleh karena itu sebagai investor terbesar di Sudan, Tiongkok perlu mendamaikan konflik yang terjadi tanpa merugikan pihak mana pun. Konflik ini menjadi penting bagi Tiongkok karena kedua negara ini berkontribusi besar terhadap ekspor minyak ke negara Tiongkok sendiri⁸.

1.2 Identifikasi Masalah

Hubungan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan Sudan (sebelum berpisah) selama 20 tahun ini dapat dikatakan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak⁹. Namun ternyata hubungan kerjasama

⁶ Philip Manyok, *Loc. Cit.*

⁷ Jeffrey Gettleman, "After years of Struggle, South Sudan Becomes A New Nations", *The New York Times*, http://www.nytimes.com/2011/07/10/world/africa/10sudan.html?_r=0, diakses pada 02 April 2016.

⁸ Benjamin Alexander Hale, "Arrighi on Sino-Sudanese Relations: Trade, Investment and Diplomacy in the Twenty-First Century", *Edith Cowan University*, http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=theses_hons, diakses pada 02 April 2016.

⁹ Shadia Basher, "China and Oil Cooperation, Are There Some More?", *SudanVisiondaily.com*, <http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=254226>, diakses pada 01 April 2016.

ini tidak berjalan dengan lancar karena terjadi konflik antara Sudan Utara (yang kemudian akan disebut Sudan) dan Sudan Selatan. Konflik ini telah menyebabkan korban hingga dua juta orang yang meninggal sejak 1983 ini dan telah menyebabkan jutaan orang lainnya harus berpindah dari tempat tinggalnya. Pemicu atau penyebab dari konflik ini pun berasal dari faktor sejarah, faktor budaya hingga faktor ekonomi khususnya masalah perdagangan minyak¹⁰.

Pemisahan Sudan Selatan ini didasarkan pada pembagian wilayah Sudan oleh negara penjajah dan memusatkan segala aktivitas pemerintahan di bagian Utara. Keadaan ini membuat warga Sudan Selatan merasa tidak adil dan menuntut kemerdekaan sejak 1955. Dominasi pihak Utara ini membuat pemerintahannya dapat bertindak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, pemerintah Utara memaksa rakyatnya termasuk Sudan Selatan untuk menerapkan syariah atau hukum Islam. Padahal kedua negara ini memiliki perbedaan budaya dan agama di mana rakyat Sudan merupakan keturunan Arab beragama Islam sedangkan rakyat Sudan Selatan berasal dari keturunan Afrika beragama Kristen¹¹.

Konflik ini tidak hanya disebabkan permasalahan agama dan ras namun juga karena adanya perebutan wilayah dan kekuasaan seperti perebutan wilayah Abyei yang kaya akan minyak¹². Pendapatan utama

¹⁰ Peter Wilkinson, "Oil and Power at Center of Vote to Split Sudan", *CNN.com*, <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/01/04/sudan.qa/>, diakses pada 02 April 2016.

¹¹ Peter Wilkinson, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*

kedua negara ini berasal dari penjualan minyak yang merupakan sumber daya alam terbesarnya. Hal inilah yang membuat konflik kedua negara semakin rumit. Hingga akhirnya, pada tahun 2011 Sudan Selatan berhasil memisahkan diri dari Sudan setelah berjuang selama 50 tahun sejak negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1956¹³. Negara Sudan pun terbagi menjadi dua yaitu Sudan dengan ibu kota Khartoum dan dipimpin oleh Omar Hassan al-Bashir dan Sudan Selatan dengan ibu kota Juba yang dipimpin oleh Salva Kiir Mayardit¹⁴.

Keputusan Sudan Selatan untuk memisahkan diri ini juga memiliki tujuan yaitu menguasai industri minyak seluruhnya yang selama ini keuntungan penjualan minyak tersebut lebih banyak dikuasai oleh Sudan. Namun impian untuk menguasai penjualan minyak ini tidak dapat terealisasi secara penuh karena mengingat bahwa faktanya kilang minyak (pabrik yang memproses sustansi natural) berada di Sudan. Hal ini membuat Sudan Selatan tidak dapat lepas sepenuhnya dari Sudan. Melihat kondisi ini, Sudan pun melakukan pengancaman untuk mematikan saluran pipa minyak apabila Sudan Selatan tidak ingin bekerjasama lagi untuk mengolah minyak. Ancaman ini benar dilakukan pada tahun 2013 di mana Presiden Omar al-Bashir menutup pipa saluran yang membawa minyak mentah Sudan Selatan untuk diekspor. Kejadian ini pun membuat adanya

¹³ “Arab Sedih, tetapi Pasrah”, 2011, *Internasional.kompas.com*, <http://internasional.kompas.com/read/2011/01/10/07330733/Arab.Sedih..tetapi.Pasrah-4>, diakses pada 17 Maret 2016.

¹⁴ Zane Larwood, “It’s All About Oil in South Sudan”, *Fordhampoliticalreview.org*, <http://fordhampoliticalreview.org/its-all-about-oil-in-south-sudan/>, diakses pada 02 April 2016.

ketimpangan ekonomi antar dua negara serta berpengaruh pada harga minyak dunia¹⁵.

Pisahnya Sudan Selatan ini juga memberikan dampak terhadap hubungan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok yang telah terjalin sekitar 20 tahun. Perbedaan yang signifikan adalah bahwa sumber daya minyak dimiliki oleh Sudan Selatan namun segala pembangunan infrastruktur terutama kilang minyak, lebih banyak dilakukan di Sudan. Ada pun implikasi dari lepasnya Sudan Selatan ini adalah menurunnya penjualan minyak Sudan ke Tiongkok¹⁶.

Tiongkok sebagai negara yang menjalin kerjasama dengan kedua negara ini berusaha untuk segera menyelesaikan perang saudara ini. Karena ketika konflik ini terjadi, maka produksi minyak mentah Sudan untuk pemenuhan kebutuhan Tiongkok pun akan tertunda. Wilayah Sudan menjadi perhatian bagi Tiongkok juga dikarenakan adanya perusahaan minyak milik Tiongkok yang beroperasi di Sudan.

Perusahaan tersebut adalah *China National Petroleum Corporation* (CNPC) yang merupakan investor asing terbesar di Sudan dengan investasi mencapai 5 miliar USD terkait pembangunan ladang minyak. Kebutuhan minyak Tiongkok terhadap wilayah Sudan ini tergolong besar

¹⁵ Astrid Ezhara Sinaga, "Keberadaan China dalam Penyelesaian Konflik Sudan-Sudan Selatan", *e-journal.hi.fisip-unmul.ac.id*, [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/JURNAL%20REVISI%20new%20\(08-29-13-05-02-48\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/JURNAL%20REVISI%20new%20(08-29-13-05-02-48).pdf), diakses pada 31 Maret 2016.

¹⁶ Hery Lazuardi, "Harga Minyak Dunia Turun, Dipicu Data Ekonomi China", *Marketbisnis.com*, <http://market.bisnis.com/read/20130611/94/144008/harga-minyak-dunia-turun-dipicu-data-ekonomi-china>, diakses pada 02 April 2016.

karena mencapai 65 hingga 80 persen dari 500.000 barel/hari produksi minyak Sudan. Jika dihitung sejak tahun 1999, Tiongkok telah menginvestasikan dananya hingga 15 miliar USD di Sudan dan CNPC mengambil keuntungan sebesar 50 persen dari hasil kilang minyak di wilayah Khartoum (ibu kota Sudan)¹⁷.

Kebergantungan Tiongkok terhadap Sudan inilah yang membuat negara ini turut campur dalam penyelesaian konflik kedua negara Sudan ini. Dalam keterlibatannya, Tiongkok tidak memihak pada negara mana pun karena Tiongkok memiliki hubungan kerjasama yang baik serta kepentingan yang berbeda dengan keduanya. Terhadap Sudan, Tiongkok memiliki pabrik pengolahan minyak serta infrastruktur lainnya, terhadap Sudan Selatan, Tiongkok membutuhkan sumber minyak yang berada di wilayah ini. Sehingga dalam mendukung perdamaian kedua negara ini, Tiongkok memilih untuk menjadi pihak yang netral.

Pisahanya Sudan Selatan ini membuat produksi minyak di kedua negara ini mulai mengalami penurunan seperti yang terjadi sejak tahun 2011. Tiongkok yang merupakan negara tujuan utama ekspor minyak mentah pun terkena imbasnya. Pada tahun 2013, ekspor minyak mentah Sudan Selatan hanya menyumbang 2% dari total impor minyak mentah China, presentase ini turun dari 5% pada tahun 2011¹⁸.

¹⁷ Shadia Basher, *Loc. Cit.*

¹⁸ "Country Analysis Brief: Sudan and South Sudan", *eia.gov*, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Sudan_and_South_Sudan/sudan.pdf, diakses pada 01 April 2016.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi fokus dalam penelitian ini pada kelangsungan kerjasama antara Tiongkok dengan Sudan setelah Sudan Selatan melepaskan diri pada tahun 2011 dan peran Tiongkok dalam mendamaikan konflik antara kedua negara ini. Keberlangsungan kerjasama dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2005 hingga 2014. Periode ini diambil dengan alasan bahwa pada tahun 2005 terjadi perjanjian damai antara Sudan dan Sudan Selatan namun belum sepenuhnya diimplementasikan¹⁹. Pada akhirnya hal ini terwujud pada tahun 2011 di mana Sudan Selatan akhirnya dapat menjadi negara yang merdeka²⁰. Kejadian ini memberikan implikasi pada kebijakan penjualan minyak antara Sudan dengan Tiongkok. Oleh karena itu, setelah Sudan Selatan memisahkan diri, maka penulis akan melihat bagaimana Tiongkok menjaga kepentingannya di Sudan khususnya di Sudan Selatan.

¹⁹ “China and USA in New Cold War over Africa’s Oil Riches”, Warandpeace.ru, <http://www.warandpeace.ru/en/analysis/view/11516/>, diakses pada 20 Maret 2016.

²⁰ “Sudan Selatan jadi Negara Baru”, *Kompas.com*, <http://internasional.kompas.com/read/2011/07/09/07571043/Sudan.Selatan.Jadi.Negara.Baru>, diakses pada 29 Maret 2016.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: *Bagaimana Tiongkok Menjaga Kepentingan/Kerjasama Ekonomi dengan Sudan dan Sudan Selatan terkait Konflik Sudan-Sudan Selatan (2005-2014)?*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Tiongkok menjaga kepentingannya khususnya untuk menjalin kerjasama dengan Sudan dan Sudan Selatan sehingga kepentingan ekonomi maupun politik Tiongkok dapat tetap tercapai.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca khususnya bagi mereka yang juga melakukan penelitian terhadap kerjasama Tiongkok dengan kedua negara Sudan. Lebih dari itu, penelitian ini pun berguna untuk memenuhi syarat sarjana S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Literatur

Pertama penulis akan menggunakan jurnal yang ditulis oleh Alex Fielding dengan judul *“Could South Sudan Push Provide*

*Blueprint for China's African Security Policy?*²¹. Dalam tulisannya, Alex menjelaskan bahwa perang sipil yang terjadi antara Sudan dengan Sudan Selatan telah menimbulkan tragedi yang menyedihkan bagi rakyat Sudan Selatan sendiri. Lebih dari 50.000 jiwa telah menjadi korban, 1,4 juta penduduk harus mengungsi, dan lebih dari 40 persen populasi harus menghadapi kelaparan yang parah.

Alex juga menjelaskan bahwa dalam melihat situasi perang seperti ini, Tiongkok sebagai mitra dagang dengan kedua negara, baik Sudan Utara maupun Sudan Selatan turut berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tiongkok ikut terlibat karena negara ini memiliki peran yang penting terhadap perdagangan dengan negara-negara di Afrika. Pada tahun 2013, perdagangan minyak antara Tiongkok dengan negara-negara di Afrika telah mencapai lebih dari 160 miliar USD. Melihat pencapaian ekonomi yang signifikan ini, para investor Tiongkok lainnya pun mulai berpindah ke Afrika dalam beberapa dekade terakhir ini. Tiongkok telah memiliki saham sebesar 40 persen melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) untuk investasi minyak dan pembangunan infrastruktur di tiga ladang minyak terbesar di wilayah Sudan.

²¹ Alex Fielding, "Could South Sudan Push Provide Blueprint for China's African Security Policy?", *Theglobalobservatory.com*, <https://theglobalobservatory.org/2015/06/south-sudan-china-africa/>, diakses pada 20 Maret 2016.

Sumber kedua, penulis mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Thomas Wheeler yang berjudul “*China’s Economic Cooperation with South Sudan Needs to be Conflict-sensitive*”²². Jurnal ini menjelaskan mengenai pinjaman dan bantuan dari Tiongkok terhadap restrukturisasi pasca konflik yang dialami Sudan Selatan setelah merdeka memang memberikan hasil nyata dalam mengembangkan kembali energi serta infrastruktur dan transportasi yang mengalami kerusakan akibat perang. Tanggung jawab untuk menghindari terulangnya konflik tersebut memang berada di tangan pemerintah Sudan Selatan itu sendiri namun aktor luar seperti Tiongkok pun dapat turut berperan untuk membuat kerjasama yang lebih baik.

Tulisan ini juga menjelaskan mengenai peran Tiongkok sebagai penyedia bantuan untuk pembangunan yang dapat dibicarakan antar pemangku kepentingan Sudan Selatan dengan Tiongkok seperti pemerintah, kelompok masyarakat sipil, serta para pebisnis. Kedua, mereka juga harus melakukan analisa terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari sistem operasi yang diberlakukan. Tindakan terakhir adalah mereka harus benar-benar mengambil tindakan berdasarkan hasil analisis yang

²² Thomas Wheeler, “China’s economic cooperation with South Sudan needs to be conflict-sensitive”, *Safeworld.org*, <http://www.saferworld.org.uk/news-and-views/comment/85-chinaas-economic-cooperation-with-south-sudan-needs-to-be-conflict-sensitive->, diakses pada 03 April 2016.

tepat dan mendalam agar dapat meminimalkan dampak negatif serta mendorong dampak positif dari usaha yang dilakukan.

Untuk sumber ketiga, penulis mengambil jurnal yang ditulis oleh Michael Martina dengan judul *South Sudan Marks New Foreign Policy Chapter for China: Official*²³. Jurnal ini menjelaskan mengenai keputusan Tiongkok untuk terlibat dalam penyelesaian konflik Sudan dan Sudan Selatan membuat pemerintah Tiongkok memasuki babak baru untuk lebih terlibat dalam mempertahankan keamanan wilayah kedua negara ini. Konflik ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi Tiongkok sendiri untuk membantu penyelesaian konflik tersebut agar tetap dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara Sudan dan Sudan Selatan. Keberadaan Tiongkok di wilayah Afrika ini telah membuat negara-negara Afrika merasa sangat terbantu karena pinjaman dan bantuan yang diberikan oleh Tiongkok dalam upaya membangun infrastruktur.

Selain itu juga memberikan penjelasan terkait alasan Tiongkok untuk berada di wilayah Afrika. Keberadaan Tiongkok di wilayah Afrika ini dikarenakan adanya kepentingan akan minyak. Hal ini telah membuat Tiongkok berperan secara aktif dalam menangani perang saudara antara Sudan dan Sudan Selatan ini.

²³ Michael Martina, "South Sudan marks new foreign policy chapter for China: official", *Reuters.com*, <http://www.reuters.com/article/us-china-southsudan-idUSBREA1A0HO20140211>, diakses pada 03 April 2016.

Meskipun memiliki peran yang terbatas karena prinsip dari kebijakan luar negerinya yang non-intervensi, Tiongkok tetap berperan secara aktif dengan menjadi pihak ketiga untuk menengahi konflik melalui cara-cara diplomasi dan kerjasama.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan bagaimana posisi Tiongkok dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan melalui kerangka teoritis, maka penulis menggunakan teori Liberalisme yang memandang bahwa konflik dapat diawasi oleh institusi internasional dengan menggunakan hukum-hukum internasional. Pada intinya, liberalisme percaya terhadap pemikiran rasional serta adanya kemungkinan untuk berkembang dalam mencapai perdamaian setelah konflik terjadi. Menurut teori Liberal, praktik terhadap resolusi konflik yang digunakan di dalam negeri dapat juga diimplementasikan untuk urusan atau konflik internasional. Pandangan liberalisme juga mengacu pada seperangkat nilai dan moral bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Pernyataan yang dijelaskan oleh John Locke ini mempercayai bahwa konflik pada akhirnya dapat diselesaikan sehingga dapat mencapai perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan internasional melalui kerjasama dan

cara-cara diplomasi dalam bentuk kebijakan luar negeri untuk urusan internasional²⁴.

Dalam mencapai perdamaian ini, kaum liberal mengembangkan “*peace theory*” yang beranggapan bahwa perdamaian hanya dapat dijamin jika sumber konflik juga dibahas. Oleh karena itu, untuk mengatasi suatu konflik maka diperlukan pengetahuan terkait akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik. Para kaum liberal pun mempercayai bahwa dalam konflik antar negara ini ada hal yang ingin dicapai yaitu salah satunya mengenai masalah ekonomi dalam perdagangan internasional²⁵.

Menurut Adam Smith dan David Ricardo, kaum liberal juga mengembangkan gagasan mengenai “*harmony of interest*” antara negara-negara, masyarakat global, serta yang terpenting adalah bahwa semua ini didasarkan pada keuntungan bersama yang muncul dari perdagangan khususnya perdagangan internasional²⁶. Perdagangan internasional ini terjadi ketika barang dan jasa melintasi batas-batas negara yang ditukar dengan uang atau barang dan jasa dari negara lain²⁷. Dalam mengadakan perdagangan internasional, setiap negara memiliki kebijakan luar negerinya masing-masing terkait untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Tak

²⁴ Charles W. Kegley dan Shannon L. Blanton, *World Politics*, (Australia: Cengage Learning, 2014), hal. 29.

²⁵ Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspective and Themes*, (Malaysia: Pearson Education, 2001), hal. 54.

²⁶ Ibid.

²⁷ David N. Balaam dan Bradford Dillman, *Op.Cit.*, hlm. 129.

jarang dalam perdagangan internasional, ada pihak-pihak yang mendominasi perdagangan tersebut khususnya para negara maju yang dapat menggunakan industri untuk mengembangkan usahanya. Negara-negara industri pun dapat menggunakan teknologinya untuk melakukan investasi terutama pembangunan infrastruktur di negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Bersumber dari investasi, terkadang menimbulkan perdagangan yang tidak menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, melalui paham liberalisme, diharapkan agar setiap negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya dan memperoleh keuntungan bersama melalui kebijakan luar negerinya²⁸.

Untuk menjelaskan mengenai konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, penulis akan menjelaskannya dengan menggunakan konsep *civil war* atau perang saudara. Konsep perang saudara ini merupakan konfrontasi bersenjata yang terorganisir antara pasukan pemerintah dan organisasi pemberontak atau antara faksi-faksi militer. Perang ini dapat menyebabkan korban jiwa hingga ribuan yang meninggal dan dapat berlangsung hingga puluhan tahun. Selain itu, konflik yang sebenarnya melibatkan pihak-pihak terdekat ini juga disebabkan oleh adanya masalah budaya, ras, dan agama. Faktor penyebab konflik ini pun pada umumnya

²⁸ Ibid.

disebabkan oleh adanya pembagian wilayah yang tidak adil oleh para penjajah sebelumnya²⁹.

Penulis pun akan menggunakan konsep *foreign policy* dalam melihat peran Tiongkok sebagai pihak ketiga untuk menjelaskan posisinya yang bersifat netral dan imparisial dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan ini. Netral berarti tidak memihak pada pihak mana pun dan tidak mendukung satu pihak tertentu, sedangkan imparisial merupakan kemampuan untuk menjalin hubungan yang bersifat objektif di mana setiap pihak berkomitmen untuk membantu pihak yang bertikai dalam negosiasi penyelesaian masalah tersebut.³⁰

Foreign policy atau kebijakan luar negeri dapat mencerminkan karakteristik suatu negara. Konsep ini bertujuan untuk melihat keputusan suatu negara yang dapat berimplikasi terhadap suatu konflik internasional. Dalam mengeluarkan suatu kebijakan, suatu negara pasti akan mempertimbangkan mengenai kondisi dan situasi internasional yang sedang terjadi saat itu serta apa dampak dari kebijakan yang dibuatnya. Pembuatan kebijakan luar negeri ini tidak hanya datang dari satu pihak namun ada aktor-

²⁹ Ane Tosterud Holte, "Chinese intervention in the second Sudanese civil war", hal.25, *University of Oslo*, https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36940/MASTER_Holte.pdf?sequence=1, diakses pada 03 April 2016.

³⁰ Astrid Ezhara Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 3.

aktor lain yang turut berperan dan mempengaruhi sang pembuat kebijakan³¹.

Situasi internasional akan sangat mempengaruhi pembuatan suatu keputusan. Dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan ini, kondisi ekonomi berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan Tiongkok sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik namun memiliki pengaruh dalam keputusan yang dibuatnya. Dalam kondisi ekonomi, suatu negara yang senantiasa berkembang dalam bidang ekonomi akan lebih aktif dalam memainkan perannya di sektor ekonomi dan politik global. Negara-negara industri ini memiliki ketertarikan dan kepentingan yang dapat memperluas jangkauan ekonominya dengan melewati batas negara. Dengan terus mengembangkan hubungan kerjasama ekonomi, maka level dari produktivitas dan kesejahteraan negara tersebut akan senantiasa meningkat. Hal ini pun pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara tersebut³².

Kebijakan luar negeri suatu negara pun dapat berimplikasi positif maupun negatif tergantung pada karakteristik negara yang membuatnya. Dalam perannya sebagai pihak ketiga, Tiongkok membuat kebijakan luar negeri yang dapat dikatakan menguntungkan namun ada hal-hal yang juga merugikan bagi

³¹ Charles W. Kegley dan Shannon L. Blanton, *Op. Cit.*, hlm. 53.

³² Charles W. Kegley dan Shannon L. Blanton, *Op. Cit.*, hlm. 73.

kedua negara Sudan. Oleh karena itu, untuk melihat kebijakan yang dibuat Tiongkok maka perlu dikaji dengan menggunakan konsep *foreign policy*³³.

Dalam suatu konflik internasional, suatu negara akan memposisikan dirinya terkait kebijakan yang dibuatnya. Dalam konflik antara Sudan dan Sudan Selatan ini, Tiongkok membuat kebijakan luar negeri yang memposisikan dirinya sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga dapat diartikan bahwa pihak ini berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih yang berusaha membantu pihak bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan melalui jalur-jalur diplomasi atau pun bentuk kerjasama. Keberadaan pihak ketiga ini juga untuk membuat adanya perubahan serta menyelesaikan konflik antar pelaku yang bersengketa³⁴.

Konsep pihak ketiga ini sangat sesuai dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Tiongkok yang tidak mengintervensi urusan negara lain. Pihak ketiga ini juga dipilih karena Tiongkok tidak memihak pada negara mana pun baik Sudan maupun Sudan Selatan serta ingin tetap menjalin hubungan kerjasama dengan kedua negara yang bersengketa ini³⁵. Dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan luar negerinya, Tiongkok bertujuan untuk

³³ Trymore Magomana, "China's Foreign Policy in Sub-Saharan Africa", 2012, Magomana.com, <http://magomana.com/index.php/en/research-papers-2/25-china-s-foreign-policy-in-sub-saharan-africa.html?showall=&start=2>, diakses pada 03 April 2016.

³⁴ Astrid Ezhara Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*

mencapai perdamaian dan keamanan bagi setiap pihak yaitu Sudan dan Sudan Selatan serta untuk mempertahankan kelangsungan hubungan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok itu sendiri.

Kebijakan luar negeri Tiongkok serta posisinya sebagai pihak ketiga dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan ini sesuai dengan prinsip yang diterapkan, yaitu *Five Principles of Peaceful Coexistence* atau Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai. Prinsip ini terutama berhubungan dengan kerjasama antara Tiongkok dan Afrika, yaitu *mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity* (menghormati kedaulatan dan integritas negara lain), *mutual non-aggression* (non-agresi), *non-interference in each other's internal affairs* (tidak mencampuri urusan internal negara lain), *equality and mutual benefit* (mengutamakan kesetaraan dan saling menguntungkan), and *peaceful co-existence* (menjaga perdamaian)³⁶. Strategi yang diterapkan oleh Tiongkok ini bertujuan untuk mempresentasikan negaranya sebagai *partner* atau rekan kerja bagi negara-negara Selatan termasuk Sudan dan Sudan Selatan. Sehingga dalam menengahi konflik serta mempertahankan hubungan kerjasamanya,

³⁶ Elizabeth Tadros, "Beyond Fuelling the Dragon: Examining China's Foreign Policy in Sudan from a Constructivist Perspective", *Polisleeds.ac.uk*, <http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/students/student-journal/ug-winter-12/130213-win12-elizabeth-tadros-3.pdf>, diakses pada 02 April 2016.

Tiongkok tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara tersebut³⁷.

Selain konsep *foreign policy*, penulis pun akan menggunakan konsep diplomasi yang merupakan instrumen Tiongkok dalam menengahi konflik ini serta upayanya untuk tetap menjalin hubungan kerjasama terutama masalah perdagangan minyak, baik dengan Sudan maupun Sudan Selatan. Diplomasi ini merupakan bentuk dari komunikasi dan negosiasi antara aktor-aktor global yang berusaha untuk mencari solusi dari suatu konflik tanpa jalur kekerasan melainkan dengan cara kerjasama. Dalam melakukan diplomasi ini, para pemimpin negara saling bertemu dan berusaha menyelesaikan konflik antar negara dengan cara damai yang dapat diterima dan menguntungkan setiap pihak³⁸.

Keberadaan Tiongkok di Sudan dan Sudan Selatan ini pun memiliki tujuan tertentu terkait bagaimana Tiongkok menjaga serta mempertahankan kepentingannya. Dalam hal ini, konsep *national interest* dapat digunakan untuk menjelaskan apa sebenarnya motivasi Tiongkok di Sudan maupun Sudan Selatan. Menurut Morgenthau, *national interest* adalah

“The meaning of national interest is survival—the protection of physical, political and cultural identity against encroachments by other nation-states”

³⁷ Ibid.

³⁸ Charles W. Kegley dan . Blanton., *Op.Cit.*, hlm. 30.

Konsep ini berarti bahwa untuk menjaga kepentingan nasional suatu negara maka hal fundamental yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga identitas bangsa tersebut. Dalam tujuan mencapai kepentingan ekonomi, negara-negara maju memberikan bantuan dan pinjaman bagi negara-negara kurang berkembang maupun berkembang untuk menjaga serta mempromosikan kepentingannya di dunia internasional. Dengan demikian maka negara yang menerima bantuan akan memiliki ketergantungan dengan negara maju, begitu pun sebaliknya.³⁹

Tidak hanya berbicara mengenai kepentingan ekonomi, setiap negara pun memiliki kepentingan politiknya terhadap negara-negara lain. Kepentingan politik suatu negara bertujuan untuk menambah partner dalam dunia internasional serta meningkatkan dukungan dalam forum PBB. Kepentingan politik dapat dicapai melalui cara-cara diplomasi yang tidak hanya berbicara mengenai keuntungan semata namun lebih ke arah hubungan jangka panjang yang dapat terus dikembangkan.⁴⁰ Kepentingan Tiongkok di Sudan dan Sudan Selatan ini dapat dilihat dari sisi ekonominya di mana Tiongkok senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan kerjasamanya dengan Sudan maupun Sudan Selatan. Bagi Tiongkok, minyak di ke dua negara ini

³⁹ Dinesh, "National Interest: Meaning, Components and Methods", <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487/>, diakses pada 10 Mei 2017.

⁴⁰ Ibid.

merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung perindustrian di negaranya.

Melalui teori dan konsep-konsep yang dijelaskan di atas, penulis berharap agar pembahasan mengenai peran Tiongkok dalam menangani permasalahan Sudan dan Sudan Selatan serta hubungan kerjasama Tiongkok dengan kedua negara Sudan ini dapat dijelaskan secara komprehensif dan menjawab pertanyaan penelitian dalam proposal penelitian ini.

1.5 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai kerjasama ekonomi khususnya penjualan minyak antara Tiongkok dengan Sudan Selatan setelah lepas dengan Sudan Utara ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian secara kualitatif ini dilakukan dengan mencari informasi melalui berbagai jurnal, buku, maupun literatur lainnya.

Penelitian deskriptif ini merupakan metode untuk meneliti suatu objek maupun suatu kondisi mengenai suatu peristiwa yang terjadi saat ini. Tujuan dari penggunaan metode deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi hingga bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Melalui metode ini pun, penulis dapat menjelaskan peran Tiongkok dalam menengahi konflik antara Sudan dan Sudan Selatan serta apa saja dampak yang terjadi dengan kerjasama antara Tiongkok dan kedua negara Sudan ini. Penjelasan ini pun

akan didukung oleh fakta-fakta serta sifat dari hubungan kerjasama yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti akan melakukan studi literatur maupun menggunakan website dalam mencari data dan informasi yang diperlukan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulis akan membagi skripsi ini ke dalam lima bab yang akan digambarkan secara garis besar melalui sistematika pembahasan ini:

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang dibagi lagi menjadi pembatasan masalah serta perumusan masalah. Setelah itu dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Pada sub bab yang keempat akan dijabarkan mengenai *survey literature, literature review*, serta kerangka pemikiran yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian secara teoritis. Kemudian akan dijelaskan mengenai metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab terakhir dalam Bab I ini merupakan gambaran umum terhadap setiap bab yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Bab II akan menjelaskan mengenai kronologis terjadinya konflik antara Sudan dan Sudan Selatan. Kronologis dalam bab ini juga akan membahas penyebab serta dampak yang timbul dari konflik tersebut. Sehingga pembaca dapat mengetahui akar permasalahan dari lepasnya

Sudan Selatan pada tahun 2011 yang memberikan dampak bagi kerjasama antara Tiongkok dengan kedua negara Sudan ini.

Bab III ini membahas mengenai kerjasama yang dijalin oleh Tiongkok dengan Sudan sejak 1959 saat Tiongkok membuka perusahaan minyaknya di Sudan yaitu *China National Petroleum Company* (CPNC). Dalam bab ini akan dilihat mengenai latar belakang dari kerjasama yang dijalin antara Tiongkok dengan Sudan, apakah alasan ekonomi semata atau terdapat alasan lain. Kemudian akan dilihat pula mengenai bentuk dari kerjasama yang diadakan apakah berupa investasi, perdagangan, atau yang lainnya. Setelah itu akan dibahas mengenai peran Tiongkok dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan ini.

Bab IV akan membahas mengenai kepentingan nasional Tiongkok baik di Sudan maupun Sudan Selatan. Dalam bab ini pun akan dibahas mengenai hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan Sudan dan Sudan Selatan. Kemudian akan menjelaskan hasil dari implementasi kebijakan ekonomi yang baru dan pada akhirnya akan dilihat bagaimana dampak ekonomi bagi Tiongkok. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat apa sebenarnya kepentingan nasional Tiongkok serta bagaimana Tiongkok menjaga kepentingannya tersebut.

Bab V merupakan penutup di mana terdapat kesimpulan dan saran yang menjadi ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Dalam kesimpulan akan berisi mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian. Sedangkan

dalam saran akan berisi harapan dari peneliti terhadap kelanjutan skripsi ini bagi para akademisi yang akan membahas topik serupa.